

Kerjasama Komite dan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri di Banda Aceh

Mistaruddin

MIN 5 Kota Banda Aceh
mistaruddinhasan@gmail.com

Abstract

Education plays a significant role in improving the quality of human resources and is a process that is integrated with the process of improving the quality of human resources themselves. For this reason, the government implements School-Based Management which involves relevant stakeholders, especially the community. This study aims to find out and analyze the Committee (community) collaboration with the Head of Madrasa in terms of improving the quality of education at Madrasa Aliyah Negeri in Banda Aceh City. Data collection in this study was conducted by interview, documentation and observation. While the results of this study are the authors find that the Cooperation Committee and the Head of MAN in Banda Aceh City have been carried out in the form of partnerships that synergize and mutually understand the roles and functions of each institution to improve the quality of Madrasah education, the implementation sees this of the boarding school program, student creativity activities, extracurricular activities and also the academic achievement of students who continue to increase along with the increasing intensity of collaboration of the committee and the head of the Madrasah as a whole in all aspects that include learning activities, facilities, infrastructure and technical education materially and non materially, so that it gives a significant influence on the quality of education at Madrasah Aliyah Negeri in Banda Aceh City.

Keywords: *cooperation; madrasa committee; education.*

A. Pendahuluan

Landasan hukum pembentukan Komite Sekolah tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kerjasama antara *stakeholder* pendidikan diatur dalam konstitusi Republik Indonesia yang terwujud melalui penetapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 56 ayat 1: “Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu

pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah”.¹

Dalam ketentuan umum UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dikemukakan bahwa: “Proses pembelajaran bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.² Bertitik tolak dari tujuan itulah, maka setiap lembaga pendidikan hendaknya bergerak dari awal sampai titik akhir dari suatu proses pendidikan, yang pada akhirnya dapat mewujudkan terjadinya pembelajaran sebagai suatu proses aktualisasi potensi peserta didik menjadi kompetensi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan.

Pembentukan Komite Madrasah bertujuan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Madrasah dalam upaya memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan Pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tentu saja Komite Madrasah mesti melakukan berbagai upaya dalam mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua siswa dan masyarakat, serta lingkungan sekitarnya, termasuk LSM–LSM yang memiliki perhatian khusus dalam bidang pendidikan.³

Komite Madrasah dapat memberikan masukan berupa program-program baru untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan manajemen Madrasah, sekaligus memberikan penilaian. Di samping itu, juga dapat memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBS).

Kerjasama Komite dan Kepala Madrasah adalah sesuatu yang mudah diucapkan namun sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor yang melingkupinya, umumnya permasalahan yang dihadapi Kepala Madrasah berkaitan dengan Komite Madrasah adalah sikap yang terlalu kaku dan merasa berada pada posisi di atas Kepala Madrasah.

Sementara di sisi lain Komite Madrasah merasa tidak dianggap dan tidak dilibatkan dalam penyusunan program-program Madrasah. Salah seorang kepala MAN di Banda Aceh⁴ dengan terus terang mengakui hal ini, menurutnya tidak semua komite Madrasah memahami dunia pendidikan, bahkan ada komite yang bukan orang

¹Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang *Sisdiknas*.

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003.

³Abdul Rahmat, *Public Relations...*, 91.

⁴Wawancara dengan Kepala Sekolah MAN 2 BandaAceh, tanggal 19 Februari 2018.

pendidikan sehingga hal ini akan memberi pengaruh signifikan terhadap kerjasama Komite dan Kepala Madrasah.

Namun demikian, tentu masih ada Madrasah yang mampu bekerjasama dengan Komite Madrasah dengan efektif dan efisien, kemudian secara bersama-sama mampu meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah tersebut baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Madrasah yang mampu menerapkan kerjasama intensif dengan komitennya haruslah mendapat apresiasi yang tinggi dari pemerintah sekaligus juga dijadikan model atau contoh bagi Madrasah lain disekitarnya.

Kepercayaan masyarakat dewasa ini kepada Madrasah semakin tinggi, di Banda Aceh Madrasah-madrasah dari berbagai tingkatan sudah mampu bersaing dan bersanding dengan sekolah-sekolah umum yang notabene mempunyai dukungan finansial yang kuat, bahkan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banda Aceh saat ini menjadi salah satu lembaga pendidikan favorit di Banda Aceh dan sekitarnya. Hal ini menjadi salah satu pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian pada MAN yang ada di Kota Banda Aceh, berkaitan dengan Kerjasama Komite dan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Kota Banda Aceh saat ini memiliki sembilah Madrasah Aliyah, dari jumlah tersebut hanya tiga yang berstatus negeri sedangkan sisanya berstatus swasta milik yayasan. Namun begitu penulis menetapkan sampel penelitian ini adalah dua Madrasah Aliyah Negeri yaitu MAN 1 (MAN Model) dan MAN 2 Kota Banda Aceh. Pengambilan dua Madrasah sampel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mengarah dan komprehensif sebagai suatu sintesis yang bisa digunakan untuk perbaikan sekaligus juga bisa menjadi model pada Madrasah-madrasah lain.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kerjasama Komite (masyarakat) dengan Kepala Madrasah dalam hal meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Kerjasama Komite dan Kepala MAN Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Banda Aceh

Komite Madrasah harus mampu meyakinkan orang tua murid, pemerintah setempat, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya bahwa madrasah itu dapat dipercaya. Dengan demikian, madrasah pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuan menganalisis biaya pendidikan yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang diperolehnya.

Maksud atau tujuan dibentuknya komite madrasah adalah agar menjadi saluran aspirasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas madrasah. Komite Madrasah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologi, nilai-nilai, kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, komite madrasah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite madrasah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagi kewenangan (*power sharing and advocacy model*), dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Peran komite madrasah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan, esensi dari partisipasi komite madrasah adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan madrasah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan secara organisatoris yang dapat memperluas kapasitas individu untuk meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah.

Lembaga pendidikan merupakan suatu institusi yang memposisikan diri dengan meminjam istilah dalam dunia manajemen sebagai industri jasa, yaitu institusi yang memberikan pelayanan (*service*) sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Pelayanan atau jasa yang diberikan sudah barang tentu harus berupa sesuatu yang bermutu, yang bisa memberikan kepuasan kepada *customers* (pelanggan). Secara sederhana, pelanggan institusi pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu *internal customer* dan *external customer*. *Internal customer* adalah pengelola institusi pendidikan itu sendiri, yaitu kepala madrasah sebagai manager sekaligus *leader*, guru

dan karyawan. Sedangkan *external customer* adalah masyarakat, pemerintah, orang tua dan dunia industri.

Suatu institusi pendidikan dikatakan bermutu, apabila kedua *customer* tersebut telah terjalin kepuasan atas jasa yang telah diberikan oleh institusi pendidikan terkait. *Internal customer* berposisi sebagai pihak yang memberi pelayanan dan merasa terpuaskan atas pelayanan yang diberikan. Sedangkan *external customer* adalah sebagai pihak yang terpuaskan mendapat pelayanan dari Internal customer.

Untuk inilah, maka institusi pendidikan membutuhkan suatu sistem (manajemen) pengelolaan yang mampu memberdayakan institusi pendidikan agar lebih bermutu dan dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Kelangsungan hidup suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat pelanggan. Dukungan pelanggan tersebut juga tergantung apakah kebutuhan dan keinginannya dapat dipenuhi dan dipuaskan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Komite Madrasah sebagai organisasi mitra madrasah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di madrasah. Peran strategis ini bisa menjadi peluang pengembangan madrasah apabila komite dan kepala madrasah mampu menjalin kerjasama yang erat dan saling menguntungkan

Pada MAN di Kota Banda Aceh ikatan kerjasama ini terlihat sangat kuat dan jelas dalam bentuk kemitraan yang saling bersinergi dan menguntungkan secara timbal balik, hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala MAN Model Banda Aceh yaitu "Kerjasama dengan komite madrasah dilakukan dalam bentuk kemitraan yang saling menghargai peran dan posisi masing-masing lembaga, sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan MAN Model adalah dengan sepengetahuan komite madrasah".⁵ Hal senada juga diungkapkan Ketua Komite MAN 2 Banda Aceh bahwa "Tujuan kerjasama ini adalah untuk mendukung program-program Madrasah dalam bentuk kemitraan yang saling menghargai sebagai mitra kerja yang mempunyai kedudukan sejajar dan selalu berkoordinasi dalam masalah pendidikan di madrasah ini, karenanya kerjasama ini harus dimulai dengan niat ikhlas semata-mata untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah, jadi bukan untuk mengumpulkan dana tambahan dari wali murid yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi ketua komite ataupun kepala madrasah".⁶

⁵Hasil wawancara dengan Kepala MAN Model Banda Aceh, tanggal 29 Oktober 2018.

⁶Hasil wawancara dengan Ketua Komite MAN 2 Banda Aceh, tanggal 5 November 2018

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan berdasarkan pernyataan di atas bahwa kerjasama Komite dan Kepala MAN di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan dalam bentuk kemitraan yang sejajar dengan prinsip saling menghargai peran dan posisi masing-masing lembaga dengan niat yang tulus ikhlas untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Untuk terciptanya kerjasama dalam bentuk kemitraan ini diperlukan penyamaan visi dan misi lembaga sehingga nantinya akan melahirkan tim work yang efektif dan mampu melahirkan ide-ide inovatif dan kreatif.⁷

Apabila kerjasama kemitraan ini mampu dipahami secara baik oleh warga madrasah dan masyarakat, maka hampir dapat dipastikan akan meningkatkan mutu pendidikan madrasah sehingga mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum. Hal ini berdasarkan ungkapan bahwa sebuah proses yang benar akan menghasilkan sesuatu atau produk yang baik.

Dasar hukum utama pembentukan Komite Madrasah untuk pertama kalinya adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Rumusan Propenas tentang pembentukan Komite Madrasah kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 yang merupakan acuan utama pembentukan Komite Madrasah. Disebutkan sebagai acuan karena pembentukan Komite Madrasah di berbagai satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Demikian pula sebutan Komite Madrasah dapat berbeda di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Namun demikian ada prinsip yang harus difahami dalam pembentukan Komite Madrasah yaitu Komite Madrasah tidak mengambil peran satuan pendidikan dan tidak juga mengambil peran Pemerintah (birokrasi)

Pembentukan Komite MAN di Kota banda Aceh tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya, yaitu: transparan, akuntabel dan demokratis.

Transparan berarti pembentukan Komite Madrasah dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan madrasah mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, sosialisasi panitia persiapan, penentuan kriteria calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, sampai penyampaian hasil pemilihan kepada masyarakat.

Akuntabel berarti pembentukan Komite Madrasah yang dilakukan oleh panitia persiapan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara substansi

⁷Buku Profil MAN 2 Banda Aceh Tahun 2018/2019

maupun finansial. Demokratis berarti bahwa proses pembentukan Komite Madrasah dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan madrasah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara. Karena Komite Madrasah harus dibentuk berdasarkan pada prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan, bukan didasarkan pada arahan atau instruksi dari lembaga pemerintahan.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala MAN Model Banda Aceh sebagai berikut:

“Dalam proses pembentukan Komite Madrasah kami tetap berpegang berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan melalui musyawarah atau rapat pemilihan pengurus dengan masyarakat dan wali murid yang diadakan 3 tahun sekali, sesuai masa kerja Komite Madrasah. Musyawarah pemilihan pengurus komite juga bertujuan untuk evaluasi kinerja komite periode sebelumnya dan juga merumuskan program-program yang akan dilaksanakan ke depan dan mempererat hubungan kerjasama madrasah dengan masyarakat. Keanggotaan Komite Madrasah di MAN I Model Banda Aceh meliputi unsur masyarakat dan unsur lembaga penyelenggara pendidikan. Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa unsur masyarakat dapat berasal dari orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi tenaga pendidikan, dan bahkan alumni. Sedangkan unsur penyelenggara pendidikan berasal dari dewan guru dan pegawai tata usaha MAN Model”.⁸

Dalam proses pembentukan Komite MAN di Kota Banda Aceh, pengelola madrasah harus bekerjasama dengan masyarakat dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga pengurus komite akan dipilih langsung oleh masyarakat dan juga untuk menghindari penunjukan pengurus Komite Madrasah oleh Kepala Madrasah, Sekretaris Komite MAN 1 Model Banda Aceh mengatakan:

“Anggota Komite MAN Model Banda Aceh berjumlah sembilan orang, dengan jumlah gasal akan memudahkan komite mengambil keputusan karena organisasi komite bersifat kolektif kolegial dimana semua anggota mempunyai kedudukan yang sama, sedangkan pengurus hanyalah sebagai pelaksana administrasi saja dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis secara sepihak atau tanpa persetujuan anggota

⁸Hasil wawancara dengan Kepala MAN Model Banda Aceh tanggal 29 oktober 2018.

lainnya. Pengurus Komite Madrasah terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota komite dengan prinsip Ketua komite bukan warga madrasah (Guru dan Kepala Madrasah)".⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses pembentukan Komite MAN di Kota Banda Aceh berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan Nasional sedangkan anggota dan kepengurusannya diputuskan melalui musyawarah atau rapat pihak madrasah dengan masyarakat dan wali murid. Dengan demikian pembentukan Komite MAN di Kota Banda Aceh telah sesuai aturan sehingga dapat diterima semua pihak.

2. Kegiatan Kerjasama Komite dan Kepala MAN Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Banda Aceh

Kepala MAN Model Banda Aceh mengatakan:

“Komite Madrasah di Kota Banda Aceh selalu membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Madrasah baik dalam bidang sarana, prasarana maupun teknis pendidikan secara materil dan non-materil. Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu. Melakukan penilaian Madrasah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstra kurikuler dan pelaksanaan manajemen Madrasah, kepala/wakil kepala Madrasah, guru, siswa, dan karyawan. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen Madrasah. Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBS) dan meminta Madrasah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu”.¹⁰

Disamping kegiatan mandiri di atas, kepala MAN Model Banda Aceh juga menjelaskan:

“Komite madrasah telah ikut melaksanakan kegiatan bersama dengan Kepala MAN di Kota Banda Aceh dalam bentuk kerjasama kemitraan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah ikut mempromosikan Madrasah, membantu mengusahakan dana untuk pembangunan fisik Madrasah, terlibat langsung dengan pertemuan orang tua wali dengan Kepala Madrasah, membantu meningkatkan kesejahteraan guru dan

⁹Hasil wawancara dengan Sekretaris Komite MAN Model Banda Aceh, tanggal 12 November 2018.

¹⁰Hasil wawancara dengan Kepala MAN Model Banda Aceh, tanggal 29 Oktober 2018

karyawan, ikut memonitoring proses pembelajaran, bahkan ketua komite MAN model Banda Aceh pernah menjadi pembina apel pagi di Madrasah”.¹¹

Hal ini juga diakui oleh ketua komite MAN 2 Banda Aceh bahwa: “Komite Madrasah telah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama, seperti sosialisasi dan promosi, mengikuti rapat bersama wali murid, pengadaan guru khusus dan juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat”.¹² Hal senada juga diutarakan Sekretaris Komite MAN Model Banda Aceh:

“Dalam hal pengembangan kompetensi guru kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan bersama adalah mengadakan dan memprakarsai kegiatan ilmiah yang dapat mengembangkan potensi guru melalui seminar, pelatihan, workshop dan lainnya secara berkelanjutan, hal ini penting dilakukan karena kompetensi guru adalah aspek terpenting dari peningkatan mutu pendidikan”.¹³

Bagaimanapun bagusya pendidikan yang diperoleh siswa madrasah tidak otomatis akan mampu membuat mereka siap diterjunkan dalam masyarakat, karena itu salah satu agenda penting dari kerjasama kemitraan komite dan kepala MAN adalah pengembangan bakat minat dan pendidikan life skill siswa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang apa yang disampaikan kepala MAN 2 Kota Banda Aceh, yaitu:

“Siswa akan siap pakai di masyarakat apabila potensi bakat dan minat mereka dikembangkan secara kontinyu dan ditambah dengan pendidikan life skill, hal ini tentu saja tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan komite yang bersinergi dengan Madrasah, dalam hal ini kegiatan kerjasama yang diprogramkan meliputi pelatihan kepemimpinan, pembinaan olahraga, pembinaan kesenian dan kreatifitas, pembinaan ketrampilan tatabusana, pramuka, PMR dan UKS dan pelatihan komputer”.¹⁴

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa secara keseluruhan keterlibatan dan kegiatan kerjasama komite dan kepala MAN di Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan baik dalam mendukung dan memantau perkembangan madrasah sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan berjalan ke arah yang seharusnya dan

¹¹Hasil wawancara dengan Kepala MAN Model Banda Aceh, tanggal 29 Oktober 2018.

¹²Hasil wawancara dengan Ketua Komite MAN 2 Banda Aceh, tanggal 5 November 2018.

¹³Hasil wawancara dengan Sekretaris Komite MAN Model Banda Aceh, tanggal 12 November 2018.

¹⁴Hasil wawancara dengan Kepala MAN 2 Banda Aceh, tanggal 1 November 2018.

masyarakat dapat mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan madrasah untuk peningkatan kualitas lulusan.

3. Kerjasama Komite dan Kepala MAN Mempengaruhi Mutu Pendidikan di Kota Banda Aceh

Perhatian masyarakat terhadap pembelajaran di Madrasah akan memberi dampak atau pengaruh terhadap mutu pendidikan secara keseluruhan di Madrasah tersebut. Salah satu bentuk nyata yaitu saat proses akreditasi Madrasah, komite dan Madrasah saling bekerjasama dalam bentuk memberi masukan dan dukungan dan ikut menyiapkan dokumen pendukung agar madrasah memperoleh hasil akreditasi yang memuaskan, hasil penilaiannya yang diambil dari data madrasah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai A terhadap standar yang ditetapkan pemerintah. Hal ini adalah hasil nyata dari kerjasama kemitraan yang dibangun selama ini. Pengaruh lain dari kerjasama ini adalah banyaknya siswa-siswa Madrasah di Banda Aceh yang mampu berprestasi di tingkat Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Nasional bahkan di tingkat Internasional, hal ini tentu saja menjadikan Madrasah Aliyah Negeri di Banda Aceh khususnya MAN Model Banda Aceh menjadi idola bagi masyarakat Aceh khususnya Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Dari hasil penelitian penulis khususnya di MAN Model Banda Aceh kerjasama komite dan kepala MAN telah menginisiasi lahirnya program *boarding school* dengan nama Program Keahlian Khusus *Boarding School* MAN Model Banda Aceh yang dikhususkan untuk putra (siswa) jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sejak tahun pelajaran 2017/2018 yang murid-muridnya berasal dari berbagai daerah di Aceh. Siswa *boarding school* (asrama) dibekali dengan pengetahuan agama pada waktu malam dengan kajian kitab kuning berbagai disiplin ilmu agama seperti dayah salafiah di Aceh, selain itu mereka juga ditargetkan untuk menghafal al-Qur'an minimal 20 juz, namun karena kerjasama yang erat ada juga beberapa siswa yang berhasil menghafal 30 juz. "Daya tarik program khusus ini ternyata luar biasa besar sehingga sejak tahun pelajaran 2018/2019 dan 2019/2020 siswa program ini mencapai dua lokal hal ini mendorong semangat komite dan kepala MAN Model Banda Aceh untuk merencanakan membuka program *boarding school* putri untuk tahun depan atau tahun pelajaran 2020/2021".¹⁵

Peran aktif komite bersama-sama dengan kepala MAN dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Kota Banda Aceh dirasakan oleh warga madrasah sangat baik,

¹⁵Hasil wawancara dengan Guru MAN Model Banda Aceh, tanggal 8 November 2018

hal ini sebagaimana yang dikatakan salah seorang guru MAN Model Banda Aceh bahwa “kehadiran dan dukungan komite MAN dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pihak madrasah sangat penting dan berarti bagi warga madrasah terutama untuk meningkatkan semangat dan motivasi bagi kami, tandasnya”.¹⁶

Dari data dan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan bahwa kerjasama komite dan kepala MAN di Kota Banda Aceh telah mempengaruhi mutu pendidikan kearah yang lebih baik dan akan terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Kerjasama kemitraan yang berhasil dibina di Kota Banda Aceh menjadi tambahan motivasi bagi guru dan siswa untuk terus berkarya dalam mengembangkan potensi masing-masing, disamping tentu saja dukungan dari pemerintah dalam bentuk dana dan regulasi.

D. Penutup

Kerjasama antara komite dengan Kepala MAN di Kota Banda Aceh dalam menjalankan peran dan fungsinya sangatlah penting. Dalam melaksanakan tugas ini, tidak ada istilah kepala komite tetapi ketua komite, hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan komite madrasah bersifat kolektif. Hubungan kerja antara komite dengan kepala MAN di Kota Banda Aceh adalah sebuah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, dengan komunikasi elegan yang dibangun atas dasar kebersamaan dalam rangka menjalankan peran masing-masing dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di samping itu komite madrasah juga berperan sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan madrasah, melaksanakan fungsi sebagai penampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan serta melaksanakan peran komite sebagai pendukung baik yang berwujud pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.

Lembaga pendidikan madrasah sangat membutuhkan suatu sistem yang standar dalam pengelolaan serta yang mampu memberdayakan madrasah agar lebih bermutu dan mampu memberi kepuasan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Karena, kelangsungan hidup suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat (orang tua, siswa, dan *stakeholder*) terhadap lembaga pendidikan tersebut.

¹⁶Hasil wawancara dengan Guru MAN Model Banda Aceh, tanggal 8 November 2018.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang secara efisien dan efektif dalam proses pembelajarannya serta menghasilkan lulusan yang handal dalam menghadapi tantangan zaman. dari hasil wawancara sekaligus observasi yang peneliti lakukan, Kerjasama Komite dan Kepala MAN dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Banda Aceh dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang berbentuk kemitraan dengan prinsip saling menghargai peranan masing-masing lembaga, kegiatan bersama yang dilaksanakan pengurus komite dan kepala madrasah maupun pengaruh yang dihasilkan dari kerjasama yang telah terbina dengan baik dalam proses peningkatan mutu pendidikan madrasah di Kota Banda Aceh.

Sebagian besar kehadiran komite sejauh ini masih dianggap sebagai formalitas semata, itu semua karena kurangnya pengetahuan secara mendalam tentang kerjasama kemitraan yang baik yang harus dibina oleh kedua lembaga tersebut. Mayoritas wali murid masih beranggapan bahwa komite madrasah memiliki peran yang hanya bertugas sebagai pengumpul dana bantuan pendidikan saja.

Era milenial sekarang ini mendorong lahirnya desentralisasi pendidikan, kreativitas warga madrasah menjadi lebih luas termasuk dalam mengelola anggaran pendidikan. Hal ini menyebabkan peran komite menjadi besar sehingga dibutuhkan kerjasama kemitraan yang kuat dan pendistribusian kewenangan diantara komite dan madrasah itu sendiri.

Keputusan yang diambil kepala madrasah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan harus selalu melibatkan semua pihak yang berkepentingan sesuai standar pengelolaan pendidikan yaitu manajemen berbasis sekolah. Namun, kenyataannya di lapangan mengenai kerjasama komite dan kepala Madrasah tidak semuanya benar-benar dijalankan atau belum terlaksana dengan baik sesuai dengan peranan masing-masing, terutama dalam bidang pengembangan kurikulum.

Hal ini disebabkan madrasah wajib mengikuti kurikulum yang ditetapkan Kementerian Agama secara nasional dari pada memasukkan *way of life* masyarakat di sekitar madrasah. Namun demikian, masih ada juga ruang kreativitas yang diberikan pemerintah kepada madrasah, komite dan masyarakat, untuk mengembangkan potensi daerah terutama dalam studi muatan lokal.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis di lapangan dapat diketahui bahwa komite madrasah yang ada di MAN 2 Banda Aceh, yang merupakan salah satu sekolah negeri yang dijadikan tempat penelitian masih kurang menjalankan peranannya. Hal itu

terjadi karena banyaknya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang utama adalah kesibukan pribadi anggota komite dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga, karena menjadi anggota komite adalah kerja ikhlas karena Allah untuk membantu pendidikan tanpa digaji atau dibayar honor oleh pemerintah ataupun madrasah. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kemampuan ekonomi wali murid MAN 2 Banda Aceh tergolong menengah ke bawah. Hal ini ditambah dengan adanya pemahaman di masyarakat bahwa pendidikan dan segala biayanya telah dibiayai dan menjadi tanggungjawab pemerintah sesuai dengan UUD 1945.

Pada titik inilah dibutuhkan kerjasama kemitraan dan kesadaran semua pihak untuk saling memahami keadaan masing-masing lembaga dalam tujuan meningkatkan mutu pendidikan. Secara umum kerjasama komite dan kepala madrasah di Kota Banda Aceh sudah terlaksana dengan baik meski belum sempurna seperti yang tertuang dalam Keputusan Mendiknas No. 044/2002 dan harus terus dievaluasi dan ditingkatkan sesuai perkembangan zaman di era milenial.

DAFTAR PUSTAKA

- Komariah, Aan dan Cipi Triatna, *Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif*, Bandung: Bumi Aksara, 2005.
- Rahmat, Abdul. *Public Relations For School*, Bandung: MQS Publishing, 2009
- Abdurrahman Mas'ud, *Antologi Studi Agama dan Pendidikan*, Semarang: Aneka Ilmu, 2004.
- Ace Suryani dan HAR Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 1993.
- Aminatul Zahroh, *Total Quality Managemen*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Amiruddin. "Upaya Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan pada SMA Negeri di Kota Banda Aceh." *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 2018.
<https://doi.org/10.22373/jie.v1i2.4141>.
- Arifin, Yuzi. "Manajemen Pembelajaran Tauhid Pada Madrasah Aliyah Swasta Jabal Nur Dan Dayah Madinatuddiniyah Jabal Nur." *DAYAH: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (1 September 2019): 251.
<https://doi.org/10.22373/jie.v2i2.4184>.

- Buku Profil MAN 2 Banda Aceh Tahun 2018/2019.
- Buku Profil MAN Model Banda Aceh Tahun 2016.
- Cyril Poster, *Gerakan Menciptakan Sekolah Unggulan*, Jakarta: Lembaga Indonesia Adidaya, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Depdiknas, *Kepmendiknas No. 044, Tentang Komite Sekolah*, Tahun 2002.
- Dirjen Binbaga Islam, *Pedoman Komite Madrasah Lampiran 1 No: Dj. 11/409/2003*
- Dwi Kartika Yanti, “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Metro Pusat Kabupaten Kota Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”, *Tesis tidak diterbitkan*, Lampung: Pascasarjana UNILA 2015.
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: PT: Rineka Cipta, 2003.
- Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- , *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Heri Suderadjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Bandung: Cipta Lekas Grafika, 2005
- , *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, Bandung: Cipta Lekas Garafika, 2005
- Jarome S, Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Jasmani, “Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Memberdayakan Komite Sekolah MIN Pahandut dan MIN Langkai Palangka Raya” *Tesis tidak diterbitkan*, Malang: Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2014.
- John M. Echolis dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- M. Adli Nurul Ihsan, “Optimalisasi peran komite Madrasah dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di MAN 3 Haruai Kabupaten Tabalong Tahun Pelajaran 2011/2012”, *Tesis tidak diterbitkan*, Banjarmasin: Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2011.
- M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- M. Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- M. N. Nasution, *Manajemen Mutu terpadu*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.
- Mansuri, "Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pembinaan Guru PAI di SDN Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie." *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 2018. <https://doi.org/10.22373/jie.v1i2.2964>.
- Moch Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan* Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013.
- , *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan* Jakarta: PT Raja grafindo Persada 2013.
- Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa Tahun Pelajaran 2014/2015)" *Tesis tidak diterbitkan* Jember: Pascasarjana IAIN Jember, 2015.
- R. Ibrahim, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* Jakarta: Imtima, 2007.
- Ralph G. Lewis dan Douglas H. Smith, *Total Quality in Higher Education*. Florida: St. Lucie Press, 1994.
- Rusman, *Manajemen Kurikulum* Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sri Renani Pantjastuti, dkk, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan* Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008.
- Sri Wardiah, "Strategi Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 Lhoknga" *Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol 3 No 2*, Banda Aceh: Pascasarjana Unsyiah, Mei 2015.
- Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksar, 2007
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sutamto, 2010, *Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan* Diakses 02 Januari 2018.
- Syafaruddin dan Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran*, Jakarta: Quantum teacing, 2005.
- Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi*, Jakarta: Grasindo. 2002.
- Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: dpks@depdiknas.go.id, 2002.
- Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sisdiknas 2003*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang *Sisdiknas*.

Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran* Bandung: Alfabeta, 2009.

Yulius S, Suryadi, Syamsuri Effendi dan R. Summa Admadjaja, *Kamus Baru Bahasa Indonesia* Surabaya: Usaha Nasional, 1984.

Yusuf A. Hasan, et. al., *Pedoman Pengawasan untuk Madrasah dan Sekolah Umum* Jakarta: Mekar Jaya, 2002.